

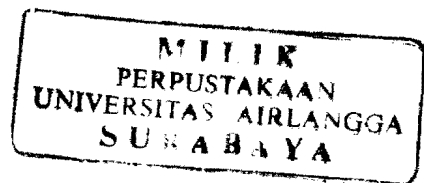
B

KEBIJAKAN IJIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

**(STUDI IMPLEMENTASI TENTANG KEBIJAKAN IJIN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN DI SURABAYA)**

kk
Fis AN 26/02
Afh
&

SKRIPSI



Oleh :

**SITI SOLIKHAH NUR AKHIRIL
NPM : 079615020**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP TAHUN 2001 / 2002**

TRANSPORTATION

KEBIJAKAN IJIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN

**(STUDI IMPLEMENTASI TENTANG KEBIJAKAN IJIN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN DI SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh :

**SITI SOLIKHAH NUR AKHIRIL
NPM : 079615020**

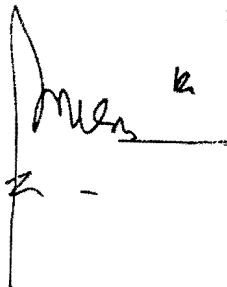
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP TAHUN 2001 / 2002**

Halaman Persetujuan

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 22 Juni 2002

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roestoto', with a horizontal line extending to the right. There is a small mark above the signature and a dash below it.

Drs. Roestoto HP
NIP. 130 783 545

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juli 2002
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang 230

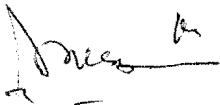
Dewan Penguji terdiri dari :

KETUA



Drs. Gitadi Tegas, Msi
NIP. 131 569 363

ANGGOTA



Drs. Roestoto HP, SU
NIP. 130 783 545

ANGGOTA



Drs. Didid Soepojo, Msi.
NIP. 131 289 507

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan "bagaimana implementasi kebijakan ijin trayek angkutan umum perkotaan di Surabaya serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi tersebut". Hal ini didasarkan pada fenomena empiris bahwa implementasi kebijakan ijin trayek di Surabaya belum optimal, tidak komprehensif dan banyak terjadi benturan-benturan di lapangan. Karena itu penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan PKL dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasinya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi serta penggunaan dokumen sebagai sumber data sekunder. Wawancara secara langsung dilakukan terhadap 24 informan dengan teknik pengambilan sampel purposive, yakni atas dasar apa yang diketahui tentang variasi serta elemen yang ada, yang terkait dengan implementasi kebijakan ijin trayek di Surabaya. Observasi dilakukan terhadap sikap/komitmen pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, serta respon para pengemudi dan pemilik lyn terhadap kebijakan ijin trayek itu sendiri. Penggunaan dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data tentang jumlah lyn dan trayeknya serta yang berkaitan regulasi dan perijinan. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan, dan dokumen yang ada. Analisis data dilakukan dengan analisa data kualitatif dan beberapa tabel frekuensi, karena data yang diperoleh adalah berupa kata-kata yang berkisar pada data kualitatif dan hasil kuesioner yang dibagikan pada 16 informan di dua lokasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ijin trayek angkutan umum perkotaan di Surabaya belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari sampel penelitian, yaitu pada lyn IM, P, D dan G dimana masih banyak ditemui penyimpangan-penyimpangan baik pada pengurusan ijin maupun pelaksanaan nya. Hasil identifikasi masalah melalui variabel penelitian yang mengacu pada pendapat Edward, yang meyakini ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan sikap pelaksana serta dukungan kelompok sasaran yang mengadopsi pendapat Grindle tentang kepentingan yang dipengaruhi dan tipe manfaat yang diperoleh, menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan ijin trayek di Surabaya. Hambatan yang utama adalah tidak adanya koordinasi akibat kurangnya komunikasi yang terjalin antar aparat pelaksana dan kelompok sasaran. Selain itu tidak adanya sanksi yang memberatkan, prosedur pengurusan yang penuh dengan kolusi menyebabkan para pemilik kendaraan sekaligus pengemudi merasa enggan untuk mengurus ijin trayek.